

Pengaruh Ukuran Pemerintah, Kompleksitas Anggaran, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pengungkapan Risiko Keuangan Proyek Infrastruktur di Provinsi Indonesia Tahun 2021–2023

Adela Ayu Kinanti¹, Aliya Maulida Fakhira², Umdatunnisa³, Nadhifatul Asfiya⁴, Aryo Faisal Rashid⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang
adela@students.unnes.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effect of regional government size, budget complexity, and financial performance on the financial risk disclosure of infrastructure projects in Indonesian provinces for the period 2021–2023. A quantitative approach with a causal associative design was applied. Secondary data were obtained from the Regional Government Financial Reports (LKPD), Audit Reports (LHP) of the Audit Board of Indonesia (BPK RI), and fiscal and infrastructure data from the Ministry of Finance and Bappenas. Multiple linear regression analysis was performed using EViews after passing all classical assumption tests. The findings indicate that regional government size, budget complexity, and financial performance do not have a significant effect on the financial risk disclosure of infrastructure projects. These results suggest that transparency in risk disclosure is not determined by government size, the complexity of budget structures, nor financial performance, and may instead be influenced by other factors outside the research model. The study contributes to the literature and provides insights for policymakers in improving financial risk disclosure practices within the public sector.

Keywords: *Regional Government Size, Budget Complexity, Financial Performance, Financial Risk Disclosure, Infrastructure Projects.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah, kompleksitas anggaran, dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan risiko keuangan proyek infrastruktur pada pemerintah provinsi di Indonesia selama periode 2021–2023. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal. Data sekunder diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, serta data fiskal dan pembangunan infrastruktur dari DJPK Kementerian Keuangan dan Bappenas. Analisis dilakukan menggunakan regresi linier berganda melalui EViews setelah seluruh asumsi klasik terpenuhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, kompleksitas anggaran, dan kinerja keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko keuangan proyek infrastruktur. Temuan ini

mengindikasikan bahwa tingkat transparansi risiko keuangan tidak ditentukan oleh besarnya pemerintah daerah, tingkat kerumitan anggaran, maupun kondisi kinerja keuangan, melainkan kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hasil ini memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur serta dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam memperbaiki praktik pengungkapan risiko keuangan di sektor publik.

Kata Kunci: Ukuran Pemerintah Daerah, Kompleksitas Anggaran, Kinerja Keuangan, Pengungkapan Risiko Keuangan, Proyek Infrastruktur.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat konektivitas wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Infrastruktur yang memadai mampu membuka akses ekonomi baru, mempercepat pergerakan barang dan jasa, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi. Karena peran strategis tersebut, pemerintah daerah terus meningkatkan alokasi belanja modal untuk sektor infrastruktur. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pada periode 2021–2023, belanja modal daerah tetap menjadi komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bahkan di tengah tekanan fiskal akibat pemulihan pascapandemi. Kondisi ini memperlihatkan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan wilayah melalui proyek-proyek infrastruktur yang bersifat jangka panjang dan bernilai strategis.

Namun demikian, karakteristik proyek infrastruktur yang kompleks dan melibatkan pendanaan besar membuatnya rentan terhadap berbagai risiko keuangan. Risiko tersebut dapat berupa pembengkakan biaya (*cost overrun*), keterlambatan penyelesaian proyek (*time overrun*), ketidaksesuaian desain, hingga ketidakpastian ketersediaan pendanaan. Ketidakpastian ini dapat berdampak langsung pada keberlanjutan fiskal daerah, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks tata kelola keuangan daerah, keberadaan risiko yang tinggi menuntut pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi risiko secara transparan melalui laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik, lembaga pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya. Transparansi ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas publik (Juliyanti, 2023).

Regulasi pemerintah sebenarnya telah memberikan pedoman yang jelas mengenai kewajiban transparansi tersebut. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menegaskan bahwa laporan keuangan daerah harus menyajikan informasi yang relevan, andal, dan lengkap, termasuk pengungkapan risiko keuangan yang dapat memengaruhi kondisi fiskal daerah (IAI,

2020). Informasi mengenai risiko keuangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip akuntabilitas karena memberikan gambaran yang lebih utuh tentang potensi ketidakpastian dalam pengelolaan proyek infrastruktur. Namun meskipun regulasi sudah mengatur dengan jelas, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa praktik pengungkapan risiko di banyak pemerintah daerah masih belum optimal. Sebagian besar laporan keuangan hanya menyampaikan informasi keuangan secara agregat tanpa menguraikan secara rinci risiko yang melekat pada proyek infrastruktur, sebagaimana sejalan dengan temuan Veranti et al., (2016) yang menyatakan bahwa tingkat pengungkapan LKPD di Indonesia rata-rata hanya sekitar 36%.

Kesenjangan antara regulasi dan praktik pelaporan ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi risiko belum sepenuhnya menjadi bagian yang terintegrasi dalam tata kelola keuangan daerah. Bahkan, penelitian terdahulu juga menemukan bahwa tingkat pengungkapan risiko antar daerah bervariasi cukup signifikan. Ada daerah yang mampu menyajikan laporan keuangan yang komprehensif, sementara sebagian lainnya masih terbatas dalam memberikan informasi mengenai potensi risiko (Veranti et al., 2016). Variasi ini menandakan bahwa terdapat faktor internal yang memengaruhi kemampuan dan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik transparansi fiskal.

Beberapa studi menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kualitas pelaporan. Daerah yang memiliki ukuran besar, baik dari sisi total aset maupun pendapatan, umumnya memiliki sumber daya manusia yang lebih memadai dan sistem pelaporan yang lebih baik. Dengan kapasitas tersebut, daerah berukuran besar menghadapi tuntutan publik yang lebih tinggi sehingga cenderung menyajikan laporan keuangan dengan tingkat pengungkapan yang lebih lengkap. Selain ukuran, kompleksitas anggaran juga diduga menjadi faktor penting. Struktur anggaran yang semakin kompleks—dengan banyaknya program, kegiatan, dan sumber pendanaan—meningkatkan potensi risiko yang harus dikelola sehingga membutuhkan transparansi yang lebih tinggi dalam pelaporan. Pemerintah daerah dengan anggaran yang lebih kompleks memiliki insentif lebih besar untuk mengungkapkan risiko keuangan agar dapat mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kepercayaan publik (Sari & Novitasari, 2022).

Selain dua faktor tersebut, kinerja keuangan juga berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan risiko. Pemerintah daerah dengan kinerja keuangan yang baik biasanya memiliki kemampuan untuk mengelola pendapatan dan belanja secara efektif, sehingga lebih percaya diri untuk menyampaikan risiko secara terbuka sebagai bagian dari akuntabilitas publik. Sebaliknya, daerah dengan kinerja yang kurang baik cenderung menghindari pengungkapan risiko karena khawatir dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat ataupun lembaga pengawas. Dengan demikian, ketiga faktor ini—ukuran pemerintah daerah, kompleksitas anggaran, dan kinerja

keuangan—diperkirakan memiliki hubungan erat dengan kualitas pengungkapan risiko keuangan proyek infrastruktur.

Walaupun penelitian mengenai transparansi fiskal sudah banyak dilakukan, kajian yang secara khusus menghubungkan faktor-faktor tersebut dengan pengungkapan risiko keuangan proyek infrastruktur masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada pengungkapan laporan keuangan secara umum tanpa secara spesifik menyoroti risiko fiskal yang timbul dari proyek infrastruktur. Padahal, proyek infrastruktur memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan kegiatan pemerintahan lainnya, terutama karena melibatkan jangka waktu panjang dan banyaknya pihak yang terlibat, termasuk pemerintah pusat, kontraktor, dan penyedia pembiayaan. Dalam konteks pemulihan ekonomi pascapandemi, pembangunan infrastruktur semakin digencarkan oleh pemerintah daerah sehingga potensi risiko fiskal menjadi semakin besar, yang memperkuat urgensi pengungkapan risiko yang lebih komprehensif (Juliyanti, 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah, kompleksitas anggaran, dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan risiko keuangan proyek infrastruktur pada pemerintah provinsi di Indonesia selama periode 2021–2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan literatur akuntansi sektor publik, terutama terkait praktik transparansi dan pelaporan risiko keuangan. Selain itu, hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas pelaporan, serta bagi lembaga pengawas seperti BPK dalam memperkuat mekanisme pengawasan keuangan daerah. Pada akhirnya, peningkatan transparansi risiko keuangan dapat mendorong tata kelola yang lebih baik dan mendukung tercapainya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berfungsi untuk memberikan landasan teoritis dan pandangan konseptual yang mendukung analisis terhadap masalah yang diteliti. Pada penelitian ini, fokus kajian berada pada tiga faktor utama yang diduga memengaruhi pengungkapan risiko keuangan proyek infrastruktur, yaitu ukuran pemerintah daerah, kompleksitas anggaran, dan kinerja keuangan. Selain itu, penelitian ini juga berlandaskan pada teori keagenan serta literatur terkait transparansi fiskal dan pengungkapan risiko di sektor publik sebagaimana dijelaskan oleh (Zimmerman, 1977) yang menegaskan bahwa karakteristik organisasi memengaruhi kualitas pengungkapan.

Teori Keagenan dalam Pemerintahan Daerah

Teori keagenan merupakan landasan teoritis yang penting dalam menjelaskan hubungan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen

yang diberi mandat untuk mengelola sumber daya publik. Dalam kerangka teori ini, diasumsikan bahwa agen memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi keuangan, proses penganggaran, serta risiko yang melekat pada kegiatan pemerintahan dibandingkan prinsipal. Ketidakseimbangan akses informasi tersebut menimbulkan apa yang disebut sebagai asimetri informasi (Jansen, 1976). Kondisi ini pada akhirnya dapat meningkatkan potensi moral hazard, seperti menyembunyian informasi, pengambilan keputusan yang tidak efisien, atau pengungkapan risiko yang tidak memadai.

Dalam pengelolaan proyek infrastruktur daerah, tingkat asimetri informasi dapat meningkat karena proyek tersebut memiliki karakteristik yang kompleks, berjangka panjang, serta melibatkan nilai investasi yang besar. Kompleksitas teknis dan finansial tersebut menyebabkan masyarakat dan lembaga pengawas tidak selalu memiliki kemampuan untuk memantau secara langsung seluruh proses pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap pengungkapan risiko menjadi semakin penting sebagai alat untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai potensi ketidakpastian dan risiko keuangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek.

Sherer & Turley (1997) menegaskan bahwa pengungkapan informasi merupakan mekanisme yang efektif untuk mengurangi kesenjangan informasi antara agen dan prinsipal. Melalui pengungkapan risiko yang memadai, pemerintah daerah dapat meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas publik, serta meminimalkan praktik yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, teori keagenan memberikan justifikasi yang kuat mengenai pentingnya pelaporan risiko secara terbuka dalam laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya terkait proyek infrastruktur yang memiliki dampak besar terhadap kondisi fiskal dan kesejahteraan masyarakat.

Pengungkapan Risiko Keuangan dalam Sektor Publik

Pengungkapan risiko keuangan merupakan salah satu elemen utama dalam praktik transparansi fiskal karena berfungsi memberikan gambaran mengenai potensi ketidakpastian yang dapat memengaruhi stabilitas anggaran maupun keberlanjutan fiskal daerah. Dalam sektor publik, risiko keuangan tidak hanya terbatas pada fluktuasi pendapatan atau ketidaksesuaian realisasi anggaran, tetapi juga mencakup berbagai aspek lain yang berkaitan dengan proses perencanaan, pengalokasian sumber daya, dan implementasi kegiatan pemerintah. Ketidaktepatan dalam penyusunan anggaran, perubahan kebijakan mendadak, ketidakpastian pendapatan asli daerah, serta penyimpangan dalam pelaksanaan program merupakan beberapa contoh risiko yang berpotensi mengganggu efektivitas pengelolaan fiskal.

Dalam konteks proyek infrastruktur, risiko keuangan muncul dengan kompleksitas yang lebih tinggi karena melibatkan nilai investasi besar, jangka waktu

panjang, dan keterlibatan berbagai pihak. Risiko yang umumnya terjadi mencakup pembengkakan biaya (*cost overrun*), keterlambatan proyek, perubahan desain akibat kondisi lapangan, hingga sengketa kontraktual dengan pihak ketiga. Risiko-risiko tersebut tidak hanya berdampak pada efisiensi proyek, tetapi juga dapat mengganggu struktur APBD apabila tidak dikelola dan diungkapkan secara memadai.

Regulasi nasional melalui Standar Akuntansi Pemerintahan PP No. 71 Tahun 2010 mewajibkan pemerintah daerah mengungkapkan informasi mengenai risiko fiskal dalam laporan keuangan. Namun, penelitian Setyaningrum & Syafitri (2012) menunjukkan adanya variasi tingkat pengungkapan risiko antar daerah. Sebagian pemerintah daerah mengungkapkan risiko secara detail, sementara lainnya hanya menyajikan informasi umum, yang mengindikasikan adanya perbedaan kapasitas pelaporan dan komitmen terhadap akuntabilitas.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan risiko tidak sepenuhnya ditentukan oleh kewajiban regulasi, tetapi sangat dipengaruhi oleh faktor internal pemerintahan daerah. Kapasitas pelaporan, kompetensi sumber daya manusia, kualitas sistem informasi akuntansi, serta komitmen pimpinan terhadap akuntabilitas menjadi faktor yang berperan besar dalam menentukan sejauh mana pemerintah daerah siap mengungkapkan risiko secara jelas dan informatif. Dengan demikian, semakin tinggi kualitas tata kelola internal, semakin besar pula kemungkinan pemerintah daerah menyajikan pengungkapan risiko yang transparan dan bermanfaat bagi publik maupun pemangku kepentingan lainnya.

Ukuran Pemerintah Daerah dan Pengungkapan Risiko

Ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu indikator struktural yang banyak digunakan dalam penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi fiskal. Ukuran tersebut biasanya diukur melalui total aset, total pendapatan, atau kapasitas fiskal yang dimiliki suatu daerah. Pemerintah daerah yang berukuran besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih memadai, baik dari sisi keuangan, teknologi, maupun kualitas aparatur. Kondisi ini memungkinkan pemerintah daerah yang besar untuk mengembangkan sistem pelaporan yang lebih komprehensif serta menyediakan informasi publik dengan cakupan yang lebih luas (Zimmerman, 1977).

Hasil penelitian Laswad et al., (2005) menunjukkan bahwa entitas pemerintah dengan skala yang lebih besar menghadapi tekanan publik yang lebih tinggi, baik dari masyarakat, media, lembaga pengawas, maupun pemangku kepentingan lainnya. Tekanan tersebut meningkatkan kebutuhan untuk menunjukkan akuntabilitas melalui pengungkapan informasi yang lebih lengkap. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah yang berukuran besar biasanya mengelola berbagai proyek strategis dengan nilai investasi tinggi dan tingkat risiko yang kompleks. Oleh karena itu, mereka dituntut untuk lebih transparan dalam menjelaskan risiko keuangan

yang melekat pada proyek-proyek tersebut agar dapat menjaga kepercayaan publik serta memastikan pengawasan yang lebih efektif.

Dengan demikian, ukuran pemerintah daerah menjadi variabel penting yang secara teoritis berpotensi memengaruhi tingkat pengungkapan risiko, terutama dalam pengelolaan proyek infrastruktur yang membutuhkan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi.

Kompleksitas Anggaran dan Pengungkapan Risiko

Kompleksitas anggaran juga menjadi faktor yang dapat memengaruhi tingkat pengungkapan risiko keuangan proyek infrastruktur. Anggaran pemerintah daerah dianggap kompleks apabila memuat banyak program, kegiatan, dan sumber pembiayaan yang beragam. Tingginya tingkat kompleksitas anggaran mencerminkan bahwa pemerintah daerah mengelola berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian fiskal. Kompleksitas tersebut dapat meningkatkan risiko kesalahan penganggaran, keterlambatan realisasi belanja, serta kesalahan estimasi biaya dalam proyek-proyek fisik.

Penelitian Piotrowski & Van Ryzin (2007) menunjukkan bahwa organisasi publik dengan tingkat kompleksitas program yang tinggi memiliki insentif untuk memberikan pengungkapan lebih detail kepada publik guna mengurangi kesenjangan informasi. Selain itu, skema pembiayaan infrastruktur seperti KPBU sering kali melibatkan struktur kontrak yang kompleks, sehingga risiko fiskal harus diungkap secara memadai.

Kinerja keuangan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja secara efektif. Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah dengan kinerja keuangan yang baik biasanya mampu mengelola sumber daya secara optimal dan memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk mendukung pelaporan keuangan yang berkualitas.

Dalam teori keagenan, pemerintah daerah yang memiliki kinerja keuangan baik cenderung lebih terbuka dalam mengungkapkan risiko karena tidak memiliki insentif untuk menutupi informasi. Transparansi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga legitimasi pemerintah daerah di mata publik dan menunjukkan bahwa mereka mampu mengelola risiko dengan baik. Sebaliknya, pemerintah daerah dengan kinerja yang rendah cenderung kurang transparan karena khawatir bahwa pengungkapan risiko dapat menyoroti kelemahan dalam pengelolaan anggaran.

Kinerja Keuangan dan Pengungkapan Risiko

Kinerja keuangan merupakan cerminan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja secara efisien serta sesuai dengan target fiskal yang telah ditetapkan. Salah satu indikator yang paling umum digunakan adalah

efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan pendapatan sesuai potensi yang dimiliki. Daerah dengan kinerja fiskal yang baik memiliki kemampuan manajerial yang lebih kuat dan sistem pelaporan yang lebih tertata sehingga cenderung melakukan pengungkapan informasi secara lebih luas dan berkualitas.

Dalam perspektif teori keagenan, pemerintah daerah yang memiliki kinerja tinggi tidak memiliki dorongan yang menyembunyikan informasi dari publik, karena keberhasilan fiskal mereka justru dapat meningkatkan legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan (Baber, 1983). Transparansi yang lebih besar menjadi strategi untuk memperkuat akuntabilitas. Sebaliknya, daerah dengan kinerja keuangan yang rendah sering kali menghadapi tekanan untuk menutupi berbagai kelemahan dalam pengelolaan fiskalnya. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah cenderung lebih berhati-hati atau bahkan mengurangi pengungkapan risiko karena khawatir informasi tersebut menimbulkan kritik atau mengungkap ketidakefisienan dalam manajemen keuangan.

Hubungan Antarvariabel dalam Kerangka Teoritik

Berdasarkan kajian teoritis yang telah disampaikan, dapat dipahami bahwa ukuran pemerintah daerah, kompleksitas anggaran, dan kinerja keuangan memiliki keterkaitan yang saling memengaruhi dalam menentukan tingkat pengungkapan risiko keuangan. Ukuran pemerintah daerah mencerminkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya birokrasi yang dimiliki, sehingga semakin besar suatu daerah maka semakin tinggi pula tuntutan untuk menyediakan informasi yang transparan kepada publik. Kompleksitas anggaran turut memperkuat kebutuhan tersebut, karena semakin rumit struktur anggaran maka semakin besar risiko yang harus dikelola dan semakin besar pula kebutuhan untuk mengungkapkan informasi risiko secara jelas.

Sementara itu, kinerja keuangan menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan fungsi fiskalnya dengan baik. Daerah dengan kinerja fiskal yang kuat umumnya lebih termotivasi untuk melakukan pengungkapan karena tidak memiliki insentif untuk menyembunyikan informasi, sedangkan daerah dengan kinerja yang lemah cenderung lebih berhati-hati dalam mengungkapkan risiko. Ketiga variabel tersebut secara teoritik saling melengkapi dalam menjelaskan variasi tingkat pengungkapan risiko keuangan pada pemerintah daerah.

Dengan memahami hubungan antarvariabel ini, penelitian berupaya memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai transparansi fiskal di sektor publik. Secara khusus, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan risiko keuangan dalam konteks pengelolaan proyek infrastruktur daerah, yang merupakan sektor yang memiliki tingkat risiko tinggi dan memerlukan akuntabilitas yang kuat.

III. METODE PENELITIAN

Pada dasarnya, bagian metode penelitian menjelaskan secara rinci bagaimana penelitian ini dilaksanakan, mulai dari pendekatan yang digunakan, jenis penelitian, sumber data, hingga teknik analisis yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal, yakni penelitian yang berfokus pada pengujian hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian mengandalkan data numerik yang terukur dan telah dipublikasikan secara resmi oleh pemerintah, terutama melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti mengolah data dalam jumlah besar secara objektif menggunakan teknik statistik sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan.

Tahapan penelitian dimulai dari identifikasi permasalahan dan analisis kebutuhan data. Pada tahap awal, peneliti merumuskan masalah berdasarkan fenomena rendahnya pengungkapan risiko keuangan dalam proyek infrastruktur daerah. Setelah itu, dilakukan penyusunan kerangka teori melalui kajian literatur, baik dari penelitian terdahulu, jurnal nasional maupun internasional, serta regulasi terkait transparansi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. Kerangka teori ini menjadi dasar dalam menyusun hubungan antarvariabel dan menentukan hipotesis yang akan diuji.

Tahap berikutnya adalah penetapan variabel beserta indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan risiko keuangan, yang diukur menggunakan indeks pengungkapan berdasarkan jumlah item risiko keuangan yang berhasil diidentifikasi dalam LKPD dan LHP BPK RI. Sementara itu, variabel independen terdiri dari ukuran pemerintah daerah, kompleksitas anggaran, dan kinerja keuangan. Ukuran pemerintah daerah diukur menggunakan logaritma natural total aset atau total pendapatan daerah. Kompleksitas anggaran dihitung melalui proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah, sedangkan kinerja keuangan diukur melalui rasio realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target PAD.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pemerintah daerah provinsi di Indonesia yang berjumlah 38 provinsi. Fokus penelitian diarahkan pada proyek-proyek infrastruktur yang tercantum dalam LKPD serta dikaitkan dengan hasil pemeriksaan BPK RI melalui LHP untuk periode tahun 2021–2023. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode sensus (sampel jenuh). Seluruh populasi dijadikan sampel karena jumlahnya relatif kecil, data tersedia cukup lengkap, serta tujuan penelitian adalah memperoleh gambaran yang menyeluruh dan representatif mengenai transparansi fiskal di tingkat provinsi. Dengan demikian, total unit observasi dalam penelitian ini adalah 38 provinsi dikalikan 3 tahun pengamatan, sehingga menghasilkan 114 observasi. Pemilihan sampel jenuh juga dilakukan untuk mengurangi potensi bias seleksi dan memastikan hasil penelitian memiliki validitas eksternal yang baik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, diperoleh dari berbagai dokumen resmi pemerintah. Sumber utama adalah LKPD dan LHP BPK RI, yang menyediakan informasi mengenai laporan keuangan daerah, temuan audit, serta tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi fiskal. Selain itu, data pendukung diperoleh dari DJPK Kementerian Keuangan yang menyediakan informasi terkait APBD, PAD, dan komposisi belanja daerah, serta data pembangunan infrastruktur dari Bappenas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu dengan menelaah, mengunduh, dan melakukan verifikasi silang terhadap laporan-laporan resmi tersebut untuk memastikan keakuratan dan konsistensinya.

Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak EViews. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, data terlebih dahulu diuji melalui serangkaian uji asumsi klasik untuk memastikan model regresi memenuhi kriteria statistik yang diperlukan. Uji normalitas dilakukan untuk memastikan distribusi residual berdistribusi normal. Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat apakah terdapat korelasi tinggi antarvariabel independen yang dapat memengaruhi hasil regresi. Selain itu, dilakukan juga uji heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa varian residual adalah konstan sehingga estimasi regresi tidak bias. Setelah seluruh uji asumsi terpenuhi, barulah dilakukan pengujian signifikansi masing-masing variabel melalui uji t serta pengujian model secara keseluruhan melalui uji F.

Dengan rangkaian prosedur tersebut, metode penelitian ini memberikan landasan yang kuat dan sistematis dalam menguji pengaruh ukuran pemerintah daerah, kompleksitas anggaran, dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan risiko keuangan proyek infrastruktur. Penyusunan metode secara terstruktur juga memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, valid, serta dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan maupun penelitian selanjutnya.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai variabel penelitian. Analisis ini mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), serta standar deviasi dari masing-masing variabel. Berikut adalah hasil analisis deskriptif untuk variabel Ukuran Pemerintah Daerah, Kompleksitas Anggaran, Kinerja Keuangan, dan Pengungkapan Risiko Keuangan.

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif

	X1	X2	X3	Y
Mean	26.62472	0.425254	0.961976	0.682456
Median	26.07543	0.164436	0.988661	0.666667

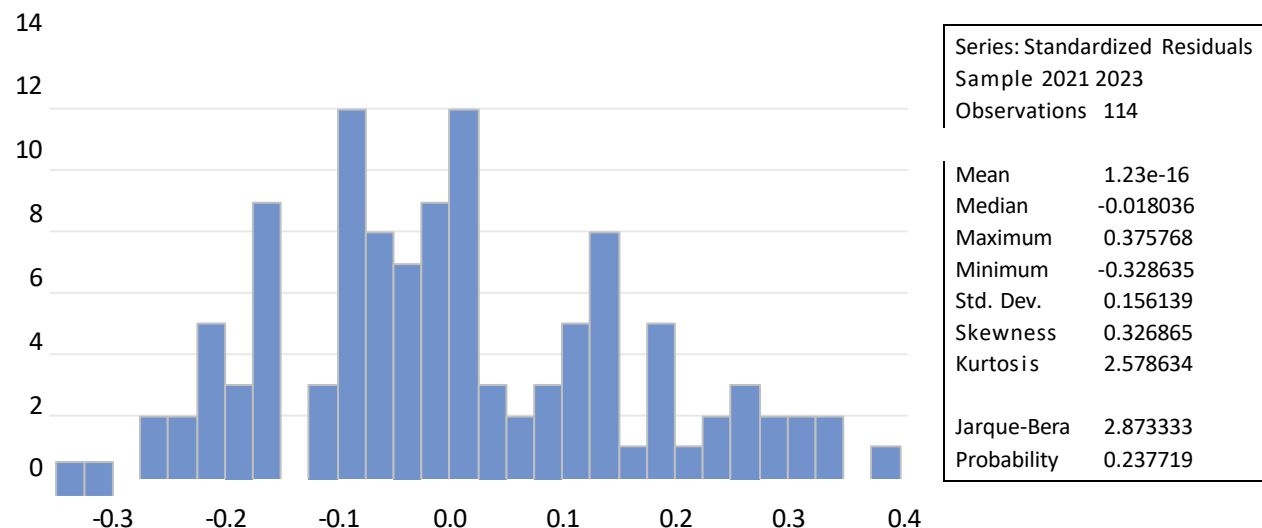
	X1	X2	X3	Y
Maximum	34.20400	3.777411	3.923362	1.000000
Minimum	6.844815	0.000861	0.001756	0.333333
Std. Dev.	4.464770	0.865650	0.596479	0.160748

Sumber : Data Diolah Eviews, 2025

Berdasarkan tabel hasil uji deskriptif, nilai rata-rata variabel X1 adalah sebesar 26.62 dengan nilai minimum 6.84 dan maksimum 34.20, serta standar deviasi 4.46 yang menunjukkan bahwa variasi data X1 cukup tinggi. Variabel X2 memiliki nilai rata-rata 0.42, dengan nilai terendah 0.00 dan tertinggi 3.77, serta standar deviasi 0.86 yang menunjukkan penyebaran data yang relatif stabil. Selanjutnya, variabel X3 memiliki mean sebesar 0.96, nilai minimum 0.00, maksimum 3.92, dan standar deviasi 0.59. Sementara itu, variabel Y memiliki nilai rata-rata 0.68, dengan nilai minimum 0.33 dan maksimum 1.00, serta standar deviasi sebesar 0.16 yang menunjukkan bahwa variasi data Y relatif kecil. Secara keseluruhan, hasil ini memberikan gambaran umum mengenai kecenderungan dan sebaran data untuk masing-masing variabel sebelum dilakukan analisis lanjutan.

Uji Asumsi Klasik

Hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Sumber : Data Diolah Eviews, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Gambar 1, terlihat bahwa distribusi residual menunjukkan pola yang mendekati distribusi normal. Histogram residual tampak menyebar secara simetris di sekitar nilai tengah, dan nilai statistik Jarque-Bera menunjukkan angka p-value lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi normal. Sebuah model regresi yang baik harus bebas dari masalah multikolinearitas, yaitu tidak adanya hubungan linear yang

kuat antar variabel independen. Untuk menguji asumsi tersebut, digunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Hasil perhitungan VIF untuk setiap variabel independen adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.008914	40.77835	NA
UKURAN_PEMDA_...	1.14E-05	38.15662	1.034741
KOMPLEKSITAS_AN...	0.000304	1.286270	1.034424
KINERJA_KEUANGA...	0.000627	3.664195	1.011090

Sumber : Data Diolah Eviews, 2025

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance yang lebih besar dari batas minimum 0,10. Selain itu, nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga berada di bawah batas maksimum 10. Kedua indikator ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan linear yang kuat antar variabel independen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas. Hal ini berarti masing-masing variabel independen dalam model tidak saling mempengaruhi secara berlebihan dan dapat digunakan secara bersamaan dengan tingkat akurasi yang baik. Kondisi ini penting untuk memastikan bahwa estimasi koefisien regresi tetap stabil dan reliabel.

Untuk menguji apakah model regresi mengalami masalah heteroskedastisitas, dilakukan pengujian menggunakan Uji Glejser. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah varians residual bersifat konstan (homoskedastisitas) atau mengalami ketidaksamaan varians (heteroskedastisitas). Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengandung heteroskedastisitas.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.915940	Prob. F(3,110)	0.4358
Obs*R-squared	2.778336	Prob. Chi-Square(3)	0.4271
Scaled explained SS	2.749833	Prob. Chi-Square(3)	0.4318

Sumber : Data Diolah Eviews, 2025

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh bahwa nilai probabilitas pada F-statistic sebesar 0,4358, nilai probabilitas pada Obs*R-squared sebesar 0,4271, serta nilai probabilitas pada Scaled Explained SS sebesar 0,4318. Seluruh nilai probabilitas tersebut berada jauh di atas tingkat signifikansi 0,05. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti empiris untuk menolak hipotesis nol (H_0) pada uji heteroskedastisitas Glejser, yang menyatakan bahwa varians residual dalam model regresi bersifat konstan atau homogen.

Dengan tidak ditolaknya H_0 , dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Artinya, varians error relatif stabil di seluruh rentang observasi dan tidak menunjukkan pola penyebaran tertentu yang mengindikasikan ketidaksamaan variansi residual. Stabilitas ini mencerminkan bahwa model tidak dipengaruhi oleh fluktuasi varians error yang dapat menyebabkan bias dalam proses estimasi.

Temuan ini juga memiliki implikasi penting terhadap kualitas model. Ketiadaan heteroskedastisitas memastikan bahwa koefisien regresi yang diestimasi melalui Ordinary Least Squares (OLS) tetap bersifat efisien, tidak bias, dan konsisten. Selain itu, standar error yang dihasilkan dapat dipercaya, sehingga pengujian signifikansi statistik terhadap koefisien regresi juga lebih akurat. Secara keseluruhan, kondisi ini memperkuat bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi klasik terkait homoskedastisitas, sehingga layak digunakan untuk analisis dan interpretasi lebih lanjut.

Analisis Regresi Data Panel

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Ukuran Pemda (X1), Kompleksitas Anggaran (X2), dan Kinerja Keuangan (X3) terhadap Pengungkapan Risiko Keuangan (Y) adalah analisis regresi linier berganda. Adapun bentuk persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.865950	0.101723	8.512864	0.0000
X1	-0.005329	0.003658	-1.456638	0.1481
X2	-0.003997	0.020036	-0.199483	0.8423
X3	-0.041493	0.023027	-1.801938	0.0743

Sumber : Data Diolah Eviews, 2025

Nilai koefisien regresi pada variabel bebas memberikan gambaran mengenai arah dan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai koefisien regresi bertanda positif, maka peningkatan satu unit pada variabel independen akan meningkatkan nilai variabel dependen. Sebaliknya, apabila koefisien regresi bertanda negatif, maka peningkatan satu unit pada variabel independen akan menurunkan nilai variabel dependen. Dengan demikian, koefisien regresi menjadi indikator penting untuk memahami bagaimana setiap variabel bebas memengaruhi variabel terikat dalam model regresi.

Koefisien regresi untuk variabel independen X1 (Ukuran Pemda) bernilai -0.005329 , yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara Ukuran Pemda (X1) dengan Pengungkapan Risiko Keuangan (Y). Artinya, setiap peningkatan satu satuan pada Ukuran Pemda, dengan asumsi variabel lain tetap konstan, akan

menyebabkan penurunan sebesar 0.005329 satuan pada Pengungkapan Risiko Keuangan. Koefisien ini mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah, tingkat pengungkapan risiko keuangan justru cenderung menurun, meskipun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik.

Koefisien regresi untuk variabel independen X2 (Kompleksitas Anggaran) bernilai -0.003997 , yang berarti terdapat hubungan negatif antara Kompleksitas Anggaran (X2) dan Pengungkapan Risiko Keuangan (Y). Dengan demikian, peningkatan satu satuan pada Kompleksitas Anggaran akan menurunkan nilai Pengungkapan Risiko Keuangan sebesar 0.003997 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kompleks anggaran yang dikelola, tingkat pengungkapan risiko keuangan justru cenderung menurun, meskipun pengaruhnya juga tidak signifikan.

Koefisien regresi untuk variabel independen X3 (Kinerja Keuangan) bernilai -0.041493 , yang menunjukkan adanya hubungan negatif antara Kinerja Keuangan (X3) dengan Pengungkapan Risiko Keuangan (Y). Artinya, setiap peningkatan satu satuan pada Kinerja Keuangan akan menyebabkan penurunan sebesar 0.041493 satuan pada Pengungkapan Risiko Keuangan. Nilai koefisien ini menunjukkan bahwa semakin baik kinerja keuangan suatu daerah, tingkat pengungkapan risiko keuangan justru cenderung menurun, meskipun pengaruhnya mendekati signifikan.

Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis Parsial

Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.865950	0.101723	8.512864	0.0000
X1	-0.005329	0.003658	-1.456638	0.1481
X2	-0.003997	0.020036	-0.199483	0.8423
X3	-0.041493	0.023027	-1.801938	0.0743

Sumber : Data Diolah Eviews, 2025

Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial yang diolah menggunakan EViews 13, dapat dijelaskan bahwa variabel Ukuran Pemda (X1) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Risiko Keuangan. Hal ini terlihat dari nilai t-statistic sebesar -1.456638 yang belum mampu menunjukkan pengaruh yang berarti, serta nilai probabilitas sebesar 0.1481 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05. Dengan demikian, Ukuran Pemda tidak terbukti memberikan dampak signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko keuangan.

Selanjutnya, variabel Kompleksitas Anggaran (X2) juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Risiko Keuangan. Nilai t-statistic sebesar -0.199483 menunjukkan bahwa variabel ini tidak memberikan kontribusi yang berarti dalam menjelaskan variasi pengungkapan risiko keuangan. Hal ini diperkuat oleh nilai

probabilitas sebesar 0.8423 yang jauh di atas batas signifikansi 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kompleksitas anggaran pemerintah daerah tidak memengaruhi pengungkapan risiko keuangan.

Variabel Kinerja Keuangan (X3) pun tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Risiko Keuangan. Nilai t-statistic yang diperoleh sebesar -1.801938 menunjukkan bahwa variabel ini belum mampu menjelaskan variasi pengungkapan risiko keuangan secara meyakinkan. Nilai probabilitas sebesar 0.0743 memang mendekati tingkat signifikansi, namun tetap lebih besar dari 0.05, sehingga secara statistik variabel ini dinyatakan tidak signifikan. Dengan demikian, kinerja keuangan pemerintah daerah belum memberikan pengaruh nyata terhadap tingkat pengungkapan risiko keuangan.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini, koefisien determinasi menunjukkan sejauh mana variabel Ukuran Pemda (X1), Kompleksitas Anggaran (X2), dan Kinerja Keuangan (X3) mampu menjelaskan perubahan pada variabel Pengungkapan Risiko Keuangan (Y). Nilai koefisien determinasi berada dalam rentang 0 hingga 1 (atau 0% hingga 100%). Semakin tinggi nilai yang diperoleh, semakin besar proporsi variasi Pengungkapan Risiko Keuangan yang dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut. Sebaliknya, nilai yang rendah menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut hanya memiliki kemampuan yang terbatas dalam menjelaskan variabel dependen.

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi

R-squared	0.051110	Mean dependent var	0.345683
Adjusted R-squared	0.025231	S.D. dependent var	0.115611
S.E. of regression	0.114143	Sum squared resid	1.433159
F-statistic	1.974981	Durbin-Watson stat	2.018264
Prob(F-statistic)	0.121920		

Sumber : Data Diolah Eviews, 2025

Berdasarkan hasil uji regresi, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.025231. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Ukuran Pemerintah Daerah (X1), Kompleksitas Anggaran (X2), dan Kinerja Keuangan (X3) secara bersama-sama hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 2,52%. Dengan kata lain, hanya 2,52% variasi perubahan pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut dalam model.

Sementara itu, 97,48% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini. Faktor-faktor tersebut dapat berupa variabel lain yang lebih dominan dan belum dimasukkan ke dalam model, serta kemungkinan adanya karakteristik eksternal lain yang belum diteliti namun berpotensi memengaruhi hasil regresi. Dengan

demikian, kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen masih tergolong sangat rendah.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah, kompleksitas anggaran, dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan risiko keuangan proyek infrastruktur di seluruh provinsi Indonesia selama periode 2021–2023. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ukuran Pemerintah Daerah (X_1) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko keuangan proyek infrastruktur pada periode penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa skala aset atau kapasitas fiskal pemerintah daerah belum memengaruhi tingkat transparansi dalam penyajian risiko keuangan proyek. Meskipun pemerintah daerah yang lebih besar cenderung memiliki sumber daya lebih memadai, pengaruhnya terhadap pengungkapan risiko keuangan tetap tidak signifikan.
2. Kompleksitas Anggaran (X_2) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko keuangan proyek infrastruktur selama periode penelitian. Artinya, kerumitan anggaran dan jumlah program atau proyek yang dijalankan belum secara langsung meningkatkan tingkat transparansi pengungkapan risiko keuangan.
3. Kinerja Keuangan (X_3) juga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko keuangan proyek infrastruktur. Meskipun kinerja keuangan yang baik diharapkan dapat mendorong akuntabilitas, capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum terbukti menjadi faktor yang cukup kuat untuk meningkatkan pengungkapan risiko keuangan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, kompleksitas anggaran, dan kinerja keuangan belum menjadi faktor penentu signifikan dalam pengungkapan risiko keuangan proyek infrastruktur. Temuan ini menjadi indikasi perlunya penelitian lebih lanjut untuk menemukan faktor lain yang lebih berperan, sekaligus memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan transparansi fiskal terkait proyek infrastruktur.

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, pemerintah daerah perlu meningkatkan pengungkapan risiko keuangan proyek infrastruktur, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas fiskal. Tingkat pengungkapan yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik, DPRD, dan lembaga pengawas terhadap pengelolaan keuangan daerah. Kepercayaan ini penting

untuk mendukung kelancaran pendanaan proyek, pengambilan keputusan, serta efektivitas pengelolaan risiko keuangan daerah.

Selain faktor ukuran pemerintah daerah, kompleksitas anggaran, dan kinerja keuangan, banyak faktor lain yang mungkin memengaruhi pengungkapan risiko keuangan proyek infrastruktur. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan dengan menambah periode observasi, meninjau variabel lain yang relevan, atau mempertimbangkan variasi populasi dan wilayah penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Baber, W. R. (1983). Toward understanding the role of auditing in the public sector. *Journal of Accounting and Economics*, 5(C), 213–227. [https://doi.org/10.1016/0165-4101\(83\)90013-7](https://doi.org/10.1016/0165-4101(83)90013-7)
- IAI. (2020). Sosialisasi Permendagri 77 Tahun 2020.
- Jansen, M. (1976). Theory of the firm. 3, 553–562. <https://doi.org/10.4337/9781839109621.00008>
- Juliyanti, W. (2023). Akuntabilitas Publik dan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia (Public Accountability and Disclosure of Local Government Financial Statements (LKPD) in Indonesia). *Reviu Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis (RAMBIS)*, 3(1), 1–17. <https://penerbitgoodwood.com/index.php/rambis/article/view/2006>
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of voluntary Internet financial reporting by local government authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(2), 101–121. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2004.12.006>
- Piotrowski & Van Ryzin. (2007). Transparency in local government: antipodean initiatives. 10(3), 645–660. <https://doi.org/10.1080/09638180120081616>
- Sari, S. P., & Novitasari, W. (2022). Local Government Financial Statements Disclosure: A Reflection on Governmental Performance in Central Java, Indonesia. *Journal of Local Government Issues*, 5(1), 49–62. <https://doi.org/10.22219/logos.v5i1.19333>
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154–170. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10>
- Sherer & Turley. (1997). Current Issue In Auditing.
- Veranti, R. I., Akuntansi, M., Gadjah, U., Ritonga, I. T., Akuntansi, M., Gadjah, U., Perubahan, L., & Arus, L. (2016). Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. 1–13.
- Zimmerman, J. L. (1977). The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives. *Journal of Accounting Research*, 15, 107. <https://doi.org/10.2307/2490636>